

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Amran Suadi. 2018. *Sengketa Ekonomi Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Amran Suadi. 2018. *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ariawan Guniadi, Suwinto Johan dan Indah Siti Aprilia. 2021. *Kapita Selekta Hukum Bisnis*, Yogyakarta : Sulu Media.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Gunawan Soermardipraja,. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullenrecht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ike Farida. 2020. *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*. Jakarta : Sinar Grafika.
- I Wayan Wesna Astara. 2018. *Hukum Kepailitan Teori dan Praktek*. Denpasar: Warmadewa.
- Jan Michiel Otto. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung : PT Revika Aditama.
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi. 2013. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*. Bandung : Alumni.

- Kristaa Yitawati, Puji Yono dan Sulistyono Adi. 2022. *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang*. Yogyakarta : Deepublish.
- M. Fauzi. 2016. *Lembaga Kepailitan di Antara Dua Kutub Kepentingan*. Yogyakarta: Leutiko Prio.
- M. Fernando E. Manullang. 2007. *Menanggapi Hukum Berkeadilan*. Jakarta ; Kompas Media Nusantara.
- Moch. Faisal Salam. 2007. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung : Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2001. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2014. *Hukum Pailit Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho Suyudi dan Nurbayanti. 2014. *Analisa Hukum Kepailitan*. Jakarta : Dimensi.
- Philipus M. Hadjon . 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Cet. 1. Surabaya: Peradaban.
- P.N.H Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Rachmat S.S Soermardiprajat 2010. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform.
- Rahayu Hartini. 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang : UMM Press.
- Rio Christiawan. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salim. 2010. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Serlika Aprita. 2019. *Keadilan Keadilan Restrukturitatif Perspektif Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kepailitan*. Jawa Tengah: CV. Sanur Untung.
- Shidarta, Abdul Rasyid dan Ahmad Sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : Prenamedia Group.

- Subekti. 2005. *PoKOK-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta :Intermasa.
- Sunaryati Hartono. 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Bina Cipta.
- Susanti Adi NugrohO. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.Manullang
- Sutan Remi Sjahdeni. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutan Remi Sjahdeni. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutan Remi Sjahdeni. 2016. , *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Sriwijastuti. 2010. *Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitur Terhadap Kreditur*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syamsudin M Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Van Aveldoorn dan Shidarta. 2006. 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung : PT. Revika Aditama.
- Yahya Harahap. 1984. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.Rahayu
- Hartini. 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang : UMM Press.
- Zainal Asikin. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid-19.

Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 19.

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 341/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 269/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 303/Pdt-Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

C. JURNAL

Achmad Syauqi. 2020. "Jalan Panjang *COVID-19* (Sebuah Refleksi Di Kala Wabah Merajalela Berdampak pada Perekonomian)". *JKUBS*. Vol. 01, No. 01, 2020.

Aminah. 2020. "Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian, Diponegoro, Private Law Review 7, No. 1 Juni 2020.

Andani, Devi dan Wiwin Budi Pratiwi. 2021. "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 28. No. 03. September 2021.

Annisa Fitria. 2018. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mencegah Kepailitan". *Lex Journalica*. Vol. 15. No. 01. April 2018.

Arya Bambang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Komang Arini Styawati. 2021. "Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 02. No. 02. Mei 2021.

Arini, Annisa Dian. 2020. "Pandemi Corona Sebagai Alasan *Force majeure* Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 09. No. 01. Juni 2020.

Atika Ismail. 2021. "Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi *COVID-19* Melalui PKPU, Kepailitan, dan Likuidasi". *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 03. No. 01. Desember 2021.

Bishoff, Thomas S. and Jeffrey R. Miller. 2009. "*Force majeure* and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane

- or Matural Disaster Hits”. *The Michigan Business Law Journal*. Vol. 01. Issue 01. Spring 2009.
- Eva Puspita Sari. 2023. “Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 06. No. 01. Februari 2023.
- Ewan McKendrick. 2013. *Force majeure and Frustration of Contract*. Second Edition Routledge Publishers. New York.
- Fikri Hadi dan Farina Gandryani. 2022. “Status Darurat Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia”. *Arena Hukum*. Vol. 15. No. 03. Desember 2022.
- Fikri Haichal,. 2022. “Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitur yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19”. *Juris-Diction*. Vol. 05. No. 06. November 2022.
- Hendriawan, Muhammad Rizaldi. Suratman, dan Abdul Rokhim. 2021. “Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang Untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan”. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 27. No. 02. Januari 2021.
- Hidayat, Rifqi dan Parman Komarudin. 2018. “Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan *Force majeure* Dalam Hukum Perdata.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. Vol. 17. No. 1. 2018.
- Ishak. 2016. “Perdamaian Antara Debitur dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18. No. 01. April 2016.
- Jonsons Mangisih, H. Manullang. Gindo L. Tobing dan Bernard Nainggolan. 2021. “Tinjauan Yuridis Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional Berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 jo Pasal 1245 KUHPer”. *to-ra Jurnal Hukum*. Vol. 7. Special Issue. Februari 2021.
- Komang Tri Krisnayana. 2021. “Perlindungan Hukum Debitur dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan dengan Wanprestasi yang Timbul Akibat Pandemi”. *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 09. No. 11. Tahun 2021.

- Liza Dzulhijjah. *et.al.* 2021. “Pandemi *COVID-19* Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 04. No. 02. Oktober 2021.
- Meliani Kartika Sari. 2020. “Sosialisasi Tentang Pencegahan *COVID-19* di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”. *Jurnal Karya Abdi*. Vol. 04. No. 01. 2020
- Moch Halim Sukur. Bayu Kurniadi. Haris. dan Ray Faradillahisari. 2020. “Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi *COVID-19* Dalam Perspektif Hukum Kesehatan” *Jurnal Inicio Legis*. Vol. 01. No. 01. Oktober 2020.
- Mustakim dan Syafrida. 2020. “Pandemi *COVID-19* Sebagai Alasan *Force majeure* Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia”. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya*. Vol. 07. No. 08. 2020.
- P.A. dan I.K Artadi Wibawa. 2020. “Akibat Hukum Terhadap Debitor Atas Terjadinya *Force majeure* (Keadaan Memaksa). *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 02. No. 06. 2020.
- Prananingtyas. 2019. “Analisis Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Nyonya Meneer”. *Jurnal Notarius*. Vol. 12. No. 02. 2019.
- Risma, Andi dan Zainuddin. 2021. “Tafsir Pandemi *COVID-19* Sebagai Alasan *Force majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian”. Vol. 05. No. 01. Maret 2021.
- Rizkyana Diah Pitaloka. 2021. “Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal National Conference for Law Studies*. Vol. 13. No. 07. 2021.
- Saurabh Sood. 2020. “*COVID-19* As a *Force majeure* in Corporate Transactions.” *Purakala (UGC Care Journal)*. Vol. 31. No. 34. April 2020.
- Sri Redjeki Slamet dan Fitri Olivia. 2021. “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi”. *Lex Jurnalica*. Vol. 18. No. 03. Desember 2021.
- Indonesia”. *Jurnal Sosial & Budaya*. Vol. 07. No. 06. 2020.

- Sri Wahyuni. 2020. “*Force majeure* dan Notoire Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19”. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 06. No. 01. 2020.
- Stevi G Tampemawa. 2019. “Prosedur dan Tata Cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Privatum*. Vol. VII. No. 06. Jul-Sep 2019.
- Syahilatul Qolbu, Aulia Chintya Maharani, dan Novi Sri Dewi. 2019. “Dampak Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 01. No. 03. 2019.
- Syafrida dan Ralang Hartati. 2020. “Bersama Melawan Virus COVID-19 di Tri Budiyo. 2021. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 50. No. 03. Juli 2021.
- Togar Monibala, Dientje Rumimpunu, dan Karel Y. Umboh. 2022. “Aspek Hukum Negosiasi Kembali Atas Kontrak Akibat *Force majeure* Pandemi COVID-19 Menurut KUH Perdata”. *Lex Crimen*. Vol. 11. No. 04. 2022.
- Triyana Syahfitri. 2021. “Perlindungan Hukum Debitur Tercampak Covid 19 Terhadap PKPU”. *Jurnal Das Sollen*. Vol. 06. No. 02. 2021.
- Waras Putri Andrianti, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Pandemi COVID-19 Sebagai Justifikasi *Force majeure* Dalam Kontrak Bisnis. Vol. 14. No. 02. 2021.
- Y. Y, Riski Pebru, Enricho Duo, dan Rizal Yudistira. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15. No.01. 2019.

D. INTERNET

- Kementrian Kesehatan RI. 2023. Laporan Pertemuan After Action Review (AAR) Covid-19. Diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/download/OQR>.
- Kementrian Keuangan RI. 2020. Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan *Force majeure*, Apakah Bisa?. Diakses dari

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>.

CNN Indonesia. 2021. Bulan dengan Kasus Kematian *COVID-19* Terbanyak”.

Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729175943-20-673976/juli-2021-bulan-dengan-kasus-kematian-Covid-19-terbanyak>.

Rizal Fadli. 2023. Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia.

Diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>.

Tri Harnowo. 2022. Wabah Corona sebagai Alasan *Force majeure* dalam Perjanjian. Diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan..>

Hukum Online. 2023. Tren Perkara Kepailitan dan PKPU 2023. Diakses dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tren-perkara-kepailitan-dan-pkpu-2023-lt6583a9e39a01c/>.

Hukumonline. 2021. *Force majeure* Bisa Jadi Alasan Permohonan Pailit dan

PKPU. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-bisa-jadi-alasan-permohonan-pailit-dan-pkpu-lt61978a13e142a/?page=2>.

Hukumonline. 2020. Kepailitan Momok Menakutkan di Masa Pandemi.

Diakses dari www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f572d24a2238/kepailitan---momok-menakutkan-di-masa-pandemi?

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. Isi Perpu Kebijakan

Kuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19. Diakses dari <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-Covid-19/> .

Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Laporan Pertemuan After Action Review*

(AAR) Covid-19. Diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/download/OQR>.

- Vina Mukaroman, Fadhotul dan Viridita Rizki Ratriani. 2020. Simak! Berikut Daftar 6 Pembatasan di PSBB untuk Cegah Covid-19. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/05/123000365/simak-berikut-daftar-6-pembatasan-di-psbb-untuk-cegah-Covid-19?page=3>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *OJK Keluarkan Peraturan Terait Penangan Dampak Covid-19*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-Covid-19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf>.
- Nurul Fitriana Putri. 2023. Pemulihan Ekonomi Dihantui Demam Permohonan PKPU dan Kepailitan. Diakses dari <https://www.jawapos.com/ekonomi/013088639/pemulihan-ekonomi-dihantui-demam-permohonan-pkpu-dan-kepailitan>. Rokan, Kamal Mustafa. (2022). Pengantar Hukum Bisnis Cetakan I. Medan :FEBI UIN-SU Press. Diakses dari [KEADAAN MEMAKSA \(OVERMACHT\) DALAM HUKUM PERDATA | Oemiy's Blog \(wordpress.com\)](#).
- Mochamad Januar Rizki. 2020. Penjelasan Prof Mahfud Soal *Force majeure* Akibat Pandemi Corona. Diakses dari laman resmi hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-profmahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>.
- Kamal Mustafa Rokan. (2022). Pengantar Hukum Bisnis Cetakan I. Medan :FEBI UIN-SU Press. Diakses dari [KEADAAN MEMAKSA \(OVERMACHT\) DALAM HUKUM PERDATA | Oemiy's Blog \(wordpress.com\)](#).
- Shidarta. 2020. *Force majeure* dan Clausula Rebus Sic Stantibus. Diakses dari <https://businesslaw.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/>.
- Reza Sulaiman. 2020. Kasus Aktif Meningkat di Bulan Desember, Ini Penjelasan Satgas Covid-19. Diakses dari <https://www.suara.com/health/2020/12/24/192941/kasus-aktif-meningkat-di-bulan-desember-ini-penjelasan-satgas-Covid-19>.

Hendriyo Widi. 2021. Garuda Belum Pailit, Masih Dalam Proses PKPU Sementara. Diakses dari

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/12/09/irfan-setiaputra-garuda-belum-pailit-masih-dalam-proses-pkpu-sementara,>.

Titik Wijayanti. 2020. *Force majeure* dan Doktrin Rebus Sic Stantibus Dalam Bencana Covid-19. Diakses dari <https://fmbpartner.com/force-majeure-dan-doktrin-rebus-sic-stantibus-dalam-bencana-Covid-19/>.

